



Buletin **Parlementaria**

Rapat Paripurna Setujui RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR RI



4 RUU Perppu
Ciptaker
Disetujui Jadi
Undang-Undang



11 Komisi III akan
Pertemuan
PPATK, Menkeu &
Menko Polhukam
dalam Rapat
Selanjutnya

Nomor 1239/IV/III/2023 • Maret 2023



9 772614 339005



Rapat Paripurna Setujui RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR RI



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani setelah pengesahan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan bahwa dalam Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 telah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah keputusan untuk memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi RUU Usul Inisiatif DPR.

"Hari ini dalam Rapat Paripurna juga dimasukkan Undang-Undang PPRT untuk bisa masuk dalam RUU inisiatif DPR terkait dengan pembahasan RUU PPRT yang mana tentu saja nanti akan dimulai pembahasannya melalui mekanisme yang ada," ujar Puan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Selasa (21/3). DPR RI pun terus mendorong adanya pembahasan yang insentif

dengan pemerintah agar bisa menghasilkan UU yang berkualitas.

Saat pengambilan keputusan di Rapat Paripurna kali ini turut dihadiri sejumlah kalangan aktivis perempuan dari berbagai LSM, komunitas yang fokus pada isu hak pekerja rumah tangga, dan perwakilan Pekerja

”

INI ADALAH KEMENANGAN KITA SEMUA, DAN KEMENANGAN HATI NURANI, DAN INSYAALLAH AKAN MENJADI KEMENANGAN BANGSA INDONESIA.

Rumah Tangga (PRT). Puan menyapa satu per satu kelompok aktivis yang hadir. Mereka yang datang berasal dari Jala (Jaringan Nasional Advokasi) PRT, SPRT (Serikat Pekerja Rumah Tangga) Sapulidi, KPI, Perempuan Mahardhika, dan Rumpun Gema Perempuan (RGP), Mitra I Made, dan Institut Sarinah.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani memberikan apresiasi langsung atas putusan ini. Menurut anggota Fraksi PKS ini, keputusan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR akan menjawab sejumlah pertanyaan dan keraguan PRT atas pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan mereka sebagai WNI yang berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Netty mengatakan, momen ini akan menjadi catatan sejarah.

Hal senada disampaikan Anggota Baleg DPR RI, Luluk Nur Hamidah. Ia mengucapkan terima kasih untuk pimpinan DPR, khususnya Puan atas dukungan terhadap RUU PPRT. "Ini adalah kemenangan kita semua, dan kemenangan hati nurani, dan Inshaallah akan menjadi kemenangan bangsa Indonesia," sambung Politisi Fraksi PKB itu.

Luluk mengatakan, RUU PPRT diharapkan akan segera mengakhiri berbagai macam bentuk diskriminasi dan juga kekerasan terhadap hampir 5 juta PRT di Indonesia yang mayoritas adalah perempuan dan 14% di antaranya adalah anak-anak. Ia juga menyebut, RUU PPRT nantinya dapat mengakhiri praktik-praktik perbudakan modern, bukan hanya bagi PRT di tanah air tapi juga untuk jutaan PRT migran di luar negeri. [ann.gam/aha](https://www.ann.gam/aha)

Scan QR untuk berita selengkapnya





DPR Menyetujui Perry Warjiyo Jadi Gubernur Bank Indonesia



FOTO: OJI/PPT

Pimpinan DPR RI saat melakukan foto bersama dengan calon Gubernur BI di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/3/2023).

DPR RI dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini menyetujui Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank

Indonesia. Persetujuan diberikan setelah Paripurna DPR menerima laporan Komisi XI DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Gubernur BI.

"Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/3). Atas pertanyaan pimpinan sidang tersebut, peserta Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 memberikan persetujuan

terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI.

Komisi XI DPR RI pada Senin kemarin (20/3) melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Gubernur BI yang diusulkan Presiden Jokowi, yakni Perry Warjiyo. Setelah uji tersebut, Komisi XI DPR pada hari yang sama langsung melakukan rapat internal dan memutuskan untuk menyetujui Perry Warjiyo, calon tunggal gubernur BI.

"Rapat internal Komisi XI DPR RI memutuskan secara musyawarah, mufakat, dan aklamasi menyetujui saudara Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI periode 2023-2028," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara.

aha



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimmbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnricha Firsta Dysie, Baggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasni Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapny



RUU Perppu Ciptaker Disetujui Jadi Undang-Undang

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani tersebut, Puan menanyakan persetujuan kepada peserta sidang.

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Puan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

Sebelumnya, menurut laporan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) M. Nurdin, selama pembahasan RUU tersebut, Baleg telah melakukan rapat-rapat kerja dengan berbagai pihak, serta rapat dengar pendapat umum dengan para pakar dan juga rapat Panja pada 15 Februari 2023 lalu.

Dikatakan Nurdin, dalam Rapat Kerja pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I atas hasil pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU, terdapat 7 fraksi yang menerima hasil kerja Panja dan menyetujui untuk dilanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Golkar,



FOTO: OJI/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

”

KAMI AKAN MENANYAKAN KEPADA SETIAP FRAKSI APAKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DAPAT DISETUJUI MENJADI UNDANG-UNDANG?

Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP.

Sedangkan 2 fraksi yakni Fraksi Demokrat dan PKS, belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dilanjutkan dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II. "Namun demikian, sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Rapat Kerja Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI memutuskan menyetujui hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk melanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang," paparnya. **bia/aha**



Paripurna DPR RI Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU ASN



Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 menyetujui perpanjangan waktu terhadap pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Acara selanjutnya permintaan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara sampai dengan masa persidangan kelima yang akan datang, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

Hal tersebut, lanjut Puan, berdasarkan laporan pimpinan Komisi II DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 14 Maret 2023, yang meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap

rancangan undang-undang tentang perubahan ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sampai dengan masa persidangan kelima.

"Oleh karena itu, maka dalam rapat paripurna ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tersebut sampai dengan Masa Sidang ke lima tahun sidang 2022-2023 yang akan datang, apakah dapat disetujui?" sebut Puan yang diiringi teriakan setuju dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam ruang Paripurna tersebut.

Sebelumnya di kesempatan berbeda, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, lambannya proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) itu karena pendataan tenaga honorer bermasalah.

Menurutnya, proses tersebut terkendala karena tak sinkronnya kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal, DPR ingin revisi UU ASN bisa menyelesaikan banyak persoalan tentang tenaga honorer di berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah.

Oleh karenanya, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendorong agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang notabene merupakan gabungan dari beberapa Komisi untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu. hal itu semata agar pemerintah memperhatikan secara serius hal tersebut. **ayu/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Perkuat Timnas Indonesia, DPR Setujui Naturalisasi Empat Pemain Asing



FOTO: EOT/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 dalam salah satu agenda yaitu Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

DPR RI menyatakan menerima permohonan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 (empat) pemain asing sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Usai persetujuan tersebut, tahapan naturalisasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 dalam salah satu agenda yaitu Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

"Sehubungan hal tersebut, apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ivar Jenner, Rafael William Struick, Justin Quincy Hubner, dan Jerome Anthony Beane Jr dapat disetujui?" tanya Puan saat memimpin rapat, seraya disambut dengan sorak suara-suara 'setuju' dari para Anggota DPR RI yang hadir.

Sebagai informasi, Kementerian Olahraga dan Pemuda (Kemenpora) bersama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Persatuan Basket Seluruh Indonesia (PP Perbas) menyampaikan rekomendasi untuk melakukan naturalisasi terhadap sejumlah pemain asing. Pada tanggal 20 Maret 2023 lalu, baik Komisi X dan Komisi III DPR telah membahas permohonan naturalisasi untuk empat pemain

asing tersebut. Langkah ini dinilai perlu dilakukan lantaran Indonesia sedang menyiapkan diri untuk menghadapi pertandingan Piala Dunia U-20 Tahun 2023 mendatang.

Selain itu, adanya naturalisasi ini diharapkan dapat menutupi kekurangan pemain sekaligus memperkuat timnas yang akan bertanding. Sehingga, Indonesia bisa memiliki tim olahraga yang tangguh dan solid. Para pemain asing yang masuk dalam daftar rekomendasi naturalisasi di antaranya Ivar Jenner (Pemain Sepakbola asal Belanda), Rafael William Struick (Pemain Sepakbola asal Belanda), Justin Quincy Hubner (Pemain Sepakbola asal Belanda), dan Jerome Anthony Beane Jr (Pemain Basket asal Amerika Serikat). **ts/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Rachmat Gobel: Kejahatan Pinjol Dapat Lemahkan Indonesia



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel saat menjadi pembicara dalam sosialisasi tentang bahaya pinjol ilegal yang diselenggarakan Koperasi Jaya Usaha Bersama dan Otoritas Jasa Keuangan di Gorontalo, Sabtu (18/3/2023).

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel, menyatakan, kejahatan pinjol, robot trading, dan *foreign exchange* (forex) bukan sekadar untuk mengeruk uang dari masyarakat tapi juga untuk merusak dan melemahkan Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat melakukan sosialisasi tentang bahaya pinjol ilegal yang diselenggarakan Koperasi Jaya Usaha Bersama dan Otoritas Jasa Keuangan itu diikuti sekitar 300 mahasiswa dari berbagai kampus di Gorontalo, Sabtu (18/3).

"Kita harus waspada dan awas terhadap situasi ini. Ini melemahkan

sendi-sendi kekuatan nasional dengan menghancurkan ekonomi rakyat," tegas Gobel saat sosialisasi. Dalam acara itu hadir Roman Nasaru selaku ketua koperasi dan Ferdy Rahmadi selaku kepala bagian hubungan kelembagaan OJK. Gobel mengaku telah 20 kali melakukan sosialisasi tentang bahaya pinjol ini, termasuk tujuh di antaranya di Kabupaten Gorontalo. Di Gorontalo sudah banyak korban berjatuh akibat kejahatan pinjol, robot trading, dan investasi forex.

Gobel mengatakan banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya pinjol ilegal. Pertama, ada masalah ekonomi. Kedua, kondisi kemiskinan yang tinggi di masyarakat. Ketiga,

ada oknum yang memang ingin memperparah kondisi ekonomi dan sosial Indonesia. "Semuanya cuma mau bikin susah. Masyarakat jangan sampai terjebak. Memang mereka selalu mengiming-imingi dengan berbagai cara seperti hadiah maupun keuntungan hingga 200 persen. Untung 100 persen saja tidak ada. Jadi pasti itu bohong," katanya.

Karena itu, kata Gobel, jika ingin berhasil maka harus bekerja. "Harus berkeringat. Tak ada sukses tanpa berkeringat," katanya. Untuk memudahkan masyarakat Gorontalo mencari pekerjaan dan mengembangkan usaha, ia memutuskan untuk melakukan investasi di Gorontalo senilai Rp1,4 triliun. "Saya ingin membangun kampung halaman saya, tanah leluhur saya. Gorontalo selalu menjadi provinsi dengan predikat termiskin kelima di Indonesia. Ini yang menjadi faktor maraknya pinjol ilegal. Melalui investasi di industri pangan ini maka akan tercipta lapangan pekerjaan hingga 300 ribu, termasuk di sektor pendukungnya, yaitu di pertanian dan kelautan. Saya tak mau ada pengangguran di Gorontalo," katanya.

Melalui investasi itu, Gobel mengajak generasi muda, khususnya para mahasiswa, untuk menjadi agen perubahan di Gorontalo. "Saya sudah memulainya dengan menanamkan uang saya. Ini investasi terbesar di Gorontalo. Sekarang, saya tantang para mahasiswa yang hadir di sini, dan umumnya kepada para generasi muda di Gorontalo untuk menjadi agen perubahan di Gorontalo. Anda siap?" katanya. Para mahasiswa dengan serentak menjawab, "Siap!".

— azk/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Lodewijk: Gaungkan Politik Damai Sambut Pemilu Serentak



FOTO:FSU/PDT

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Lodewijk F. Paulus dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Provinsi Lampung. Kamis (16/3/2023).

DPR RI menggaungkan politik damai jelang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Lodewijk F. Paulus dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Provinsi Lampung. Ia meminta seluruh elemen di Indonesia berkolaborasi menjaga stabilitas negara.

Stabilitas negara kata Lodewijk bisa mencegah berbagai hal buruk bagi Indonesia. "Mari kita sama-sama menjaga kekompakan, menjaga toleransi, mencegah terjadinya polarisasi sehingga terjadilah yang dikatakan stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan," ucap Lodewijk, Kamis (16/3).

Lebih lanjut, Politikus Partai Golkar tersebut percaya, stabilitas

politik dan keamanan bisa menghadirkan stabilitas ekonomi. Kestabilan ekonomi katanya akan menguntungkan kehidupan

”

MARI KITA SAMA-SAMA MENJAGA KEKOMPAKAN, MENJAGA TOLERANSI, MENCEGAH TERJADINYA POLARISASI SEHINGGA TERJADILAH YANG DIKATAKAN STABILITAS POLITIK DAN JUGA STABILITAS KEAMANAN.

masyarakat. "Inshaallah dengan adanya stabilitas ekonomi semua kebutuhan masyarakat akan mudah didapat dan akan tercukupi," ujar Lodewijk.

Lodewijk yang merupakan Legislator dari Daerah Pemilihan Lampung I juga secara khusus meminta masyarakat Lampung ikut menjaga kestabilan politik nasional. Ia berharap, masyarakat Lampung tidak terjebak oleh isu-isu politik yang meresahkan seperti isu presiden tiga periode, penundaan pemilu, hingga pemilihan legislatif sistem tertutup atau terbuka.

Menurut Lodewijk, Lampung adalah daerah yang sangat strategis untuk politik nasional. Seperti diketahui, provinsi di ujung selatan Pulau Sumatera tersebut sudah sejak lama melahirkan aktor penting bagi politik dan pemerintahan Indonesia.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pemilu serentak diadakan pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Masyarakat akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, hingga pejabat daerah dalam kesempatan yang sama dalam pemilu itu.

Sementara itu, Komisi II DPR RI baru saja menyetujui Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 soal perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Melalui rapat kerja pada Rabu (15/3) lalu, kesembilan fraksi di Komisi II yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP telah menyetujui pelimpahan tugas perubahan RUU dari pemerintah ke DPR RI. [ndn/rdn](https://www.ndn.rdn)



Aminurokhman Apresiasi Kanwil BPN Jateng Bangun Sistem Berbasis Elektronik

Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman, mengapresiasi upaya Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah yang sedang membangun sistem berbasis elektronik. Hal itu guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

"Sekarang sedang dibangun sistem elektroniknya. Oleh karenanya kita apresiasi bahwa Kanwil BPN Jawa Tengah sudah mempersiapkan sistem yang lebih perfect untuk memberikan fungsi layanan kepada masyarakat," kata Aminurokman kepada Parlementaria tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Provinsi Jawa Tengah Komisi II DPR melakukan pertemuan ke Kanwil BPN Provinsi Jateng, Kamis (16/3).

Dengan dibangunnya sistem elektronik tersebut, ia meyakini dapat mencegah dan meminimalisasi

kasus kejahatan mafia tanah, yang dinilai banyak melibatkan oknum-oknum dari BPN itu sendiri. "Dengan dibangunnya sistem elektronik ini meminimalkan oknum-oknum yang mau bermain di luar koridor ketentuan. Saya yakin kalau kesadaran masyarakat itu berbanding lurus dengan sistem yang dibangun sekarang tentu akses-akses yang kemarin dilakukan oleh oknum di internal maupun eksternal BPN akan

”

DENGAN DIBANGUNNYA SISTEM ELEKTRONIK INI MEMINIMALKAN OKNUM-OKNUM YANG MAU BERMAIN DI LUAR KORIDOR KETENTUAN.

bisa ditekan. Kalau itu sudah bisa dilakukan masyarakat juga akan diberikan kemudahan," kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Aminurokhman berharap kantor-kantor BPN di wilayah lainnya dapat membuat juga sistem elektronik tersebut. Oleh karena, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dibutuhkan percepatan transformasi digital dengan mengubah secara struktural dari cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, dan bertransaksi dari yang sebelumnya offline ke online serta digital.

"Nah itu komitmen dari kanwil BPN seperti itu ya mudah-mudahan ini semua bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia tiap kanwil dan kepala kantor bisa memastikan sistem elektronik itu bisa membantu masyarakat dalam memberikan layanan yang optimal," tutupnya.

— qq/rdn



Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman saat mengikuti pertemuan tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Provinsi Jawa Tengah Komisi II DPR melakukan pertemuan ke Kanwil BPN Provinsi Jateng, Kamis (16/3/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: QQ/PDT

Profesi Guru Harus Mendapat Perlindungan Hukum dalam Menjalankan Tugas

Anggota Komisi III DPR RI RI Gilang Dhiela Fararez menerima audiensi Persatuan Guru Swasta Indonesia. Dia menerima aspirasi dari para guru terkait perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Gilang mengungkapkan akan memperjuangkan agar profesi guru mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Jangan sampai ada guru yang merasa takut dalam mendisiplinkan murid.

"Akhir-akhir ini banyak guru-guru yang dilaporkan oleh anak didiknya, ini menjadi aspirasi mereka agar nantinya aspirasi ini bisa kita perjuangkan, agar nantinya ada perlindungan, atau payung hukumnya, sehingga guru yang bekerja mendidik tidak ada rasa takut. Banyak guru sekarang

yang mengalami ketakutan dalam menjalankan profesi," papar Gilang di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan

hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan, karena hakikatnya guru dan siswa merupakan elemen terpenting guna terwujudnya tujuan pendidikan yang berkorelasi dalam mengemban terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Guru merupakan pihak penanggung jawab utama dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah. Peran guru bukan hanya mampu memberikan tanggung jawab penuh hanya di dalam ruang kelas saja melainkan juga harus mampu berperan aktif di lingkungan sekolah. Tidak heran dalam pandangan masyarakat juga, profesi guru merupakan pekerjaan yang paling mulia karena dianggap sebagai sosok yang serba bisa dan menjadi panutan.

ssb/aha

”
PERAN GURU BUKAN HANYA MAMPU MEMBERIKAN TANGGUNG JAWAB PENUH HANYA DI DALAM RUANG KELAS SAJA MELAINKAN JUGA HARUS MAMPU BERPERAN AKTIF DI LINGKUNGAN SEKOLAH.



FOTO: DEEP/PTD

Anggota Komisi III DPR RI RI Gilang Dhiela Fararez foto bersama usai menerima audiensi Persatuan Guru Swasta Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi III akan Pertemukan PPATK, Menkeu & Menko Polhukam dalam Rapat Selanjutnya

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama PPATK membahas transaksi janggal yang sempat disebut terjadi di lingkungan Kemenkeu. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, rapat ini akan mempertemukan tiga pihak yang berkaitan, guna membuka informasi yang seterang-terangnya kepada publik tentang isu transaksi keuangan mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rapat Komisi III akan berlanjut dengan memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan PPATK. Semua pihak akan diklarifikasi terkait isu transaksi keuangan

mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Sahroni mengungkapkan, pemanggilan dilakukan setelah pihaknya mendapat klarifikasi isu tersebut dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Undangan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pengurus Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang (TPPU).

"Jadi saran teman-teman Komisi III mengundang Bu Menkeu rapat pada tanggal 29 Maret. Jadi tiga tuh, ada Pak Ivan, Bu Menkeu, ada Pak Menko yang tiga-tiganya adalah berstatus Komite Nasional TPPU," ungkap Sahroni di Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

Dalam kesempatan rapat Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan soal tingkahlaku pegawai pajak, apakah benar pegawai yang seperti Alun itu sudah jamak terjadi. "Dalam konteks kebocoran ini, apa memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau ada tikus seperti Alun, Alun (Rafael Alun Trisambodo)?" tanya Desmond.

— ssb/aha



FOTO: ARV/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat konferensi pers setelah memimpin Rapat Kerja bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Selasa 21/3/2023.

Komisi V Pantau Preservasi Jalan Soreang, Rancabali, dan Cidaun di Jabar

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) untuk memastikan pembangunan preservasi jalan Soreang dan Rancabali (Kabupaten Bandung) dan jalan Cidaun (Kabupaten Cianjur) Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Kunspik Anang Susanto mengatakan pembangunan jalan itu menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN.

"Betul, akses jalan ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat karena statusnya sudah beralih. Sehingga, secara teknis dan aturan berubah," kata Anang kepada **Parlementaria** usai memimpin pertemuan Kunspik di kantor Direksi keet HK-BAP Kabupaten Pasirjambu,

Kabupaten Bandung, Kamis (16/3).

Dijelaskannya, Komisi V telah menganggarkan terkait perbaikan dan pelebaran jalan dari Soreang ke Cidaun, di mana jalan tersebut sebelumnya merupakan termasuk jalan provinsi. Namun, saat ini berubah menjadi jalan nasional. "Sebagai orang Kabupaten Bandung, kita berharap ada perubahan status jalan, juga berdampak dari segi aturan geometri tentang jalan raya, pelebaran serta saluran irigasinya," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Kepala Balai PJN Wilan Oktavian menambahkan kurang lebih sekitar 80 km jalan dalam proses perbaikan yang awalnya jarak tempuh memakan waktu hingga 4 jam dengan perkiraan kecepatan kendaraan di 20-25 km/jam. Ia berharap setelah selesai

perbaikan jalan serta geometri atau tikungan, dapat menjadi lebih aman dan dapat memangkas waktu tempuh sekitar 2 jam dengan perkiraan kecepatan kendaraan 40 km/jam.

"Nah khusus di ruas ini, Soreang-Rancabali-Cidaun dulunya Jalan provinsi sekarang sudah jalan nasional dan memang masih banyak jalan yang belum standar dari sisi lebar maupun dari sisi tikungan-tikungannya. Nah ini untuk saat ini beberapa spot akan kita lebarkan kemudian beberapa tikungan geometrik kita perbaiki supaya lebih aman dan nyaman. Harapa, kita tidak dilebarkan target kita kecepatannya bisa 40 km/jam kurang lebih gitu. Jadi bisa lebih cepat hampir dua kali lipat atau turun waktunya setengahnya kira-kira itu," tambah Wilan. **mri/rdn**



FOTO: MRI/PDT

Ketua Tim Kunspek Anang Susanto foto bersama usai memimpin pertemuan Kunspik di kantor Direksi keet HK-BAP Kabupaten Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Kamis (16/3/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Intan Fauzi Dukung Pemerintah Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendukung kebijakan pemerintah terkait pelarangan jual beli pakaian bekas impor ilegal. Menurutnya, jual beli tidak hanya pakaian bekas, tetapi juga sepatu bekas dan barang bekas impor lainnya yang ilegal memang harus diberantas.

"Impor barang bekas (ilegal) jelas melanggar hukum karena sudah diatur di dalam Permendag No.40 Tahun 2022, perubahan dari Permendag No.18 Tahun 2021. Oleh karena itu Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan memusnahkan barang-barang bekas tersebut, pakaian bekas,

sepatu bekas dan lain-lain yang masuk ke Indonesia secara ilegal untuk dimusnahkan karena yaitu tadi artinya melanggar hukum," ucap Intan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

Impor barang bekas yang dikenal dengan thrifting, saat ini memang sangat menjamur di kalangan masyarakat. Hal ini karena mudahnya akses masuk barang bekas tersebut di berbagai pelabuhan di Indonesia yang sangat luas. Untuk itu, Intan menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dari pemerintah.

"Pemerintah dalam hal ini Kemendag, Bea Cukai, kemudian Angkatan Laut, karena pintu masuknya

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi.

dari berbagai laut yang ada di Indonesia, ini betul-betul harus bisa memberantas. Jadi memang tidak bisa hanya satu kementerian/ lembaga, ini lintas kementerian/ lembaga harus bisa secara berkoordinasi untuk penegakan hukum importir ilegal pakaian dan barang bekas," tegas Politisi Fraksi PAN tersebut.

Sebab, ia menilai, jika permintaan terhadap barang bekas masih tinggi, maka akan masih banyak oknum-oknum importir nakal yang berusaha memasukkan barang-barang bekas tersebut ke Indonesia. Oleh sebab itu, Intan mengingatkan kepada masyarakat agar jangan membeli pakaian maupun sepatu bekas impor.

Kepada Parleментарia, Intan merinci kerugian apa saja yang ada ketika pakaian bekas impor tersebut masuk ke Indonesia. Di antaranya adalah dari sisi kesehatan. Menurutnya, pakaian bekas impor berpotensi membawa penyakit dari luar ke Indonesia.

"Kemudian ini akan menghilangkan berbagai pendapatan negara karena industri tekstil kita akan juga terdampak, produsen-produsen Indonesia juga akan terdampak. Dengan adanya barang impor bermerek tapi bekas, kemudian dijual bebas baik di pasar tradisional di online di mall secara terbuka dengan harga yang murah jadi semata-mata ini juga bagian dari edukasi kepada masyarakat bahwa memberi barang ilegal karena murah tapi bermerek, ini tentu tidak dibenarkan, ini jelas melanggar hukum," tutupnya. **ftn,bia/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Foto: Oji/PDT

Herman Khaeron Ungkapkan Kendaraan Listrik Industri Masa Depan



FOTO:SSB/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat mengikuti Kunspek Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI ke PT WIKA Industri Manufaktur (WIMA) di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/3/2023).

Guna mendukung transisi energi menuju pemanfaatan yang maksimal pada energi terbarukan, para pemangku kepentingan terus berupaya meletakkan pondasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan transisi BBM ke listrik pada kendaraan bermotor. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron beranggapan industri kendaraan berbasis energi listrik merupakan industri masa depan.

"Ini adalah industri masa depan, meski saya belum dapat laporan keuangannya," ujar Herman saat Kunjungan Kerja Spesifik Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI ke PT WIKA Industri

Manufaktur (WIMA) yang mempunyai bisnis inti sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri otomotif dan perakitan otomotif, di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/3).

Menurut Politisi dari Fraksi Demokrat ini, Indonesia ke depan harus meletakkan pondasi terhadap kebutuhan berbagai energinya, yang berbasis energi baru terbarukan. Meskipun demikian dia berharap, peralihan ini tidak hanya pada kendaraan saja tapi juga alat rumah tangga. "Peralihan ini bukan hanya pada alat transportasi tapi juga alat rumah tangga, dari gas LPG ke kompor induksi," ungkap Herman.

Dari sisi pemanfaatan energi, dunia masih sangat tergantung

terhadap energi tak terbarukan alias energi fosil. Masifnya penggunaan energi fosil membuat bumi diracuni polusi, lingkungan rusak akibat limbah yang dihasilkan, dan emisi gas rumah kaca meningkat. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan sangat penting untuk ditingkatkan dan terus digaungkan akhir-akhir ini.

Ada banyak alasan mengapa energi terbarukan harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas. Alasannya adalah ketersediaannya yang melimpah, tidak menghasilkan polusi serta emisi karbon, dan membuat masyarakat mandiri dalam mengupayakan energi sendiri.

ssb/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Upaya Advokasi DPR terhadap Konsumen Meikarta Membuahkan Hasil

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkap upaya advokasi yang dilakukan DPR RI terhadap konsumen Apartemen Meikarta mulai membuahkan hasil. Dijelaskannya, sejak mengadukan nasibnya ke DPR pada 18 Januari 2023 lalu, saat ini mayoritas anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) sudah mendapatkan haknya dari pengembang.

"Saya memperoleh informasi dari Ketua Perkumpulan

Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Bapak Aep Mulyana, bahwa per 14 Maret ini, dari

”

SAAT INI, TINGGAL 6 ORANG KONSUMEN LAGI YANG MASIH DIPROSES OLEH PIHAK MEIKARTA.

131 orang anggota perkumpulan konsumen Meikarta yang mengadukan nasib ke DPR RI, sudah 114 orang yang mendapatkan refund melalui mekanisme titip jual dan 13 orang yang sudah mendapatkan unit," kata Andre dalam keterangan resminya, Rabu (15/3).

Andre mengatakan, data yang disampaikan perkumpulan konsumen Meikarta sangat menggembirakan. Data itu juga menunjukkan bahwa DPR bersungguh-sungguh dalam melakukan fungsi pengawasan.

"Ini menunjukkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasco Ahmad berhasil membantu konsumen Meikarta mendapatkan solusi. Saat ini, tinggal 6 orang konsumen lagi yang masih diproses oleh pihak Meikarta," terang Legislator Dapil Sumatera Barat itu.

Andre mengatakan, langkah masyarakat mengadukan nasibnya ke DPR seperti yang dilakukan konsumen Meikarta sudah tepat. Selaku Politisi Fraksi Partai Gerindra yang bertugas di Komisi VI, Andre memastikan pihaknya berkomitmen akan mengawal setiap aduan masyarakat hingga tuntas dan membuahkan hasil.

"Sekali lagi bahwa gebrak meja di Komisi VI dan kunjungan sidak ke Meikarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasco sudah memberikan hasil kepada Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang mengadukan nasib ke DPR RI," ucapnya. [bia/rdn](#)

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: OJI/PDT

Kendaraan Berbahan Bakar Gas Disambut Positif

Uji coba kendaraan berbahan bakar gas yang dicanangkan PT. Pertamina Gas Negara (PGN) mendapat apresiasi dari Komisi VII DPR RI. Kendaraan *hybrid* antara BBM dan gas dicoba pada kendaraan motor dan mobil. Kendaraan ini disambut positif sebagai tren masa depan.

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari saat ditemui Parlementaria di Kuta, Bali, dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik, Jumat (17/3), menyatakan, kendaraan berbahan bakar gas ini memang harus diproduksi, karena Indonesia punya sumber daya gas yang melimpah.

"Saya melihat positif kendaraan berbahan bakar gas, karena Indonesia memiliki sumber daya gas. Ini adalah kekayaan alam kita. Ini harus dioptimalkan. Dengan demikian, kita



Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari saat diwawancarai usai mengikuti rangkaian kunjungan kerja spesifik, Jumat (17/3/2023).

”

INI TANTANGAN KE DEPAN, BELUM SEBANYAK INFRASTRUKTUR PENGISIAN BBM. SAYA KIRA BISA DIINTEGRASIKAN, SEHINGGA KE DEPAN DI SETIAP SPBU ADA SPBG. DI NEGARA-NEGARA BARAT SUDAH BIASA KENDARAAN MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR GAS. TRANSPORTASI PUBLIK KITA JUGA SUDAH MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR GAS. MUDAH-MUDAHAN INI BISA LEBIH MURAH UNTUK MASYARAKAT SEKALIGUS MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA YANG KITA MILIKI,

juga secara perlahan mengurangi impor ketergantungan terhadap energi lainnya," ucap Diah. Politisi PKS tersebut memandang, kendaraan berbahan bakar gas emisinya bisa lebih bersih dan harganya juga bisa lebih murah.

Hanya saja, saat melihat

kendaraan yang didesain dengan memiliki tabung gas tersebut, menurutnya, harus ada yang ditata ulang dengan fiturnya. Penempatan tabungnya masih memakan tempat, terutama di bagasi depan bagi motor dan bagasi belakang bagi mobil. Di sisi lain, kendaraan

berbahan bakar gas ini, lanjut Diah, tinggal memperbanyak infrastruktur pengisiannya saja. Sarana SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) harus tersedia di mana-mana seperti SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), agar masyarakat mudah mengakses gas untuk kendaraannya.

"Ini tantangan ke depan, belum sebanyak infrastruktur pengisian BBM. Saya kira bisa diintegrasikan, sehingga ke depan di setiap SPBU ada SPBG. Di negara-negara barat sudah biasa kendaraan menggunakan bahan bakar gas. Transportasi publik kita juga sudah menggunakan bahan bakar gas. Mudah-mudahan ini bisa lebih murah untuk masyarakat sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki," tutup legislator dapil Jabar II ini. mh/rdn



RUU Migas Harus Jadi Penopang Peningkatan Pendapatan Negara

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan Revisi Undang-

Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) harus menjadi salah satu penopang dan mendorong peningkatan pendapatan negara. Ia berharap Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ataupun Kementerian Perindustrian dapat diberikan anggaran lebih, seperti halnya Kementerian Keuangan. Hal itu agar bisa menghasilkan peningkatan pendapatan negara jauh lebih besar lagi.

Diketahui dalam setahun Kementerian Keuangan memiliki anggaran mencapai Rp35 triliun, sementara Kementerian ESDM hanya Rp6 triliun sedangkan BPH Migas di level Rp241 miliar. Menurut Maman, jika memungkinkan anggaran BPH Migas bisa dinaikkan Rp1-2 triliun, sehingga bisa mendapatkan kekuatan ekstra untuk melakukan penindakan dan pengawasan.

"Saya ingin dengan adanya revisi terkait Rancangan UU Migas harus menjadi salah satu penopang pendapatan negara yang pada prinsipnya keberadaan RUU migas di tengah kondisi saat ini harus menjadi salah satu pendorong untuk membangun kesadaran semua pihak. Pada saatnya nanti Undang-Undang (UU) yang dilahirkan bisa mendorong peningkatan percepatan pendapatan negara," demikian dikatakan Maman usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali, Jumat, (17/3).

Ia menegaskan, negara harus hadir memberikan



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali, Jumat, (17/3/2023).

FOTO: RISE/PDT

kemudahan kepada perusahaan-perusahaan anak bangsa untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas keuangan. Artinya harus ada semangat besar dari negara yang nantinya akan ada elaborasi. "Pada prinsipnya mungkin pandangan saya belum tentu benar tapi layak diperdebatkan di Komisi VII untuk didiskusikan supaya

”

NEGARA HARUS HADIR MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ANAK BANGSA UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS-FASILITAS KEUANGAN.

RUU Migas ini, menjadi suatu UU yang paling paripurna bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan sesuai pasal 33 UUD. Bahwa pada ujungnya sumber kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sepenuhnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," urai Legislator Dapil Kalimantan Barat I ini.

Di sisi lain, Politisi Partai Golkar ini mendorong Pertamina bisa menjadi salah satu korporasi besar dan mandiri di negara ini. Tidak lagi diberikan *privilese* yang sangat besar oleh negara. Pasalnya saat selalu diberikan *privilese* dampak dari mobilisasi, daya gerak dan daya juang suatu institusi itu akan menjadi lemah. Tanpa disadari cepat atau lambat era pertarungan ke depan di era globalisasi ini pasti mendorong pada semua institusi korporasi untuk bersaing secara kompetitif.

rni/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Banggar DPR Soroti Efektivitas Dana TKD Sumsel



FOTO: RR/PDT

Wakil Ketua Banggar Syarif Abdullah Alkadrie saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kunker Badan Anggaran DPR di Kantor Gubernur Sulsel, Palembang.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Syarif Abdullah Alkadrie menyoroti efektivitas dan dampak penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Wakil Gubernur beserta seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Palembang.

"Alokasi anggaran untuk transfer daerah yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

perlu dipastikan efektivitasnya" ungkapnya, Senin (20/3).

Terkait hal itu, dalam kunjungan ini Banggar DPR RI menyerap langsung masukan dan saran

”

TERDAPAT TIGA MASALAH UTAMA YANG DIALAMI OLEH PIHAK PEMKAB DAN PEMKOT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. "PERTAMA, TERKAIT TIDAK TRANSPARANNYA DANA BAGI HASIL (DBH),

terutama dari pihak Pemkab dan Pemkot di Provinsi Sumatera Selatan terkait realisasi dana TKD itu. "Berkaitan dengan kunjungan ini, kita menyerap, serta mencoba mengerti apa yang menjadi persoalan-persoalan di daerah berkaitan dengan dana transfer daerah, dan tadi ada banyak juga yang disampaikan," ungkapnya.

Legislator dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut mengungkapkan terdapat tiga masalah utama yang dialami oleh pihak Pemkab dan Pemkot di Provinsi Sumatera Selatan. "Pertama, terkait tidak transparannya Dana Bagi Hasil (DBH)," ungkapnya.

Syarief mengatakan terkait hal itu, terdapat sejumlah daerah yang mengaku tidak mendapatkan DBH sesuai dengan presentasi dari penghasilan yang diberikan daerahnya. "Kemudian, terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengecil dari tahun sebelumnya, bahkan ada daerah yang tidak dapat," sambungnya.

Terakhir, berkaitan dengan peraturan pemerintah yang terlambat sehingga ada keterlambatan gerak di daerah. Untuk itu, Syarif menyatakan berbagai temuan tersebut akan menjadi masukan bagi pihaknya untuk ditindaklanjuti dan dibicarakan dengan Pemerintah Pusat beserta instansi terkait, mengingat adanya perbaikan sangat diperlukan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

"Sehingga ini akan membawa terhadap kemajuan secara nasional", pungkasnya. [rr/rdn](https://www.rrrdn.com)



Sumut Harus Manfaatkan Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional



FOTO: OJI/PTI

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin M. Said saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara di Gedung Keuangan Negara, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/3/2023).

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin M. Said menilai perekonomian Sumatera Utara (Sumut) sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, yaitu dengan kontribusi sebesar 22,63 persen. Lebih lanjut, ia menjelaskan, Provinsi Sumatera Utara perlu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional untuk bisa tumbuh lebih tinggi dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2022 sudah menunjukkan tren membaik.

” SELAIN ITU, PERAN BANK INDONESIA SEBAGAI KATALISATOR PEMBANGUNAN DIHARAPKAN DAPAT LEBIH AKTIF DAN EFEKTIF DALAM MENJAGA DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERBASIS KEPADA SEKTOR EKONOMI...

"Ekonomi Sumut tumbuh sebesar 4,73 persen secara kumulatif, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,61 persen. Begitu pula dengan inflasi, Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) diharapkan bisa terus memantau pergerakan harga di seluruh wilayah Sumatera Utara, apalagi saat ini sudah mulai memasuki awal Ramadhan," jelas Muhidin saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai (DBC) Provinsi Sumatera Utara di Gedung Keuangan Negara, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/3).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap Bank Indonesia terus memainkan perannya lebih optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara lebih tinggi lagi. Sebab, menurutnya, kontribusi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian di daerah sangat signifikan.

"Selain itu, peran Bank Indonesia sebagai katalisator pembangunan diharapkan dapat lebih aktif dan efektif dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis kepada sektor ekonomi unggulan daerah khususnya sektor pertanian dan UMKM di wilayah Provinsi Sumatera," imbuh Legislator Dapil Palu, Sulawesi Tengah ini.

oji/rdn



BKSAP Dorong Pengembangan Kerja Sama Perminyakan dan Gas Indonesia-Mozambik

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz

Tohir mendorong pengembangan kerja sama hubungan perdagangan dan ekonomi antara Indonesia-Mozambik di bidang pertambangan dan energi, khususnya di sektor perminyakan dan gas. Ia menegaskan kerja sama tersebut penting dilakukan, karena kekuatan usaha suatu negara harus mempunyai *link* yang kuat pada hampir di semua negara industri perminyakan besar dunia.

Demikian disampaikan Hafisz Tohir saat usai menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) Duta Besar Republik Indonesia Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Mozambik dan Malawi, Herry Sudrajat, yang digelar di Ruang Pimpinan BKSAP DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3).

"Kita menerima tamu dari Duta Besar Indonesia untuk Mozambik. Banyak hal yang dia ceritakan terkait dengan hubungan politik, perdagangan, dan ekonomi Indonesia dan Mozambik. Kalau kita perhatikan, negara yang baru berkembang seperti Mozambik itu banyak sekali menawarkan kesempatan kepada kita untuk masuk ke sana. Ini yang kami catat bahwa ada beberapa hal yang membuat kita punya kesempatan yang cukup signifikan di sana, antara lain dengan pertambangan dan energi," ujar Politisi Fraksi PAN itu.

Oleh karena itu, ia akan menyampaikan kepada mitra Komisi



FOTO: MGN/PDT

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir usai menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) Duta Besar Republik Indonesia Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Mozambik dan Malawi, Herry Sudrajat, yang digelar di Ruang Pimpinan BKSAP DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

DPR RI terkait, khususnya komisi energi yang bermitra kerja dengan Pertamina, PGN, dan sebagainya agar Indonesia bisa mengembangkan usaha energi. "Seperti yang dilakukan oleh PetroChina, hampir di semua negara-negara industri perminyakan besar di dunia ini dia masuk. Memang kadang-kadang ada yang untung dan rugi, tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk masuk global business perminyakan dan gas dunia tidak cukup kita dengan bermain di negara sendiri," tandasnya.

Hal tersebut menjadi catatan penting khususnya bagi dirinya yang sekaligus juga duduk sebagai Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan. "Saya

mencatat bahwa kita harus mulai mengembangkan pemasukan pemasukan dari negara-negara agar berkembang khususnya yang bisa kerjasama ekonomi dengan kita. Mozambik adalah salah satu negara yang bisa kita jadikan tujuan investment kita," ujarnya.

Ia menjelaskan meskipun Negara Mozambik belum dikenal jamak orang sebagai negara investor, maka itu menjadi tantangan ke depan. "Kalau kita masuk investasi ke Jepang, tentu pesaing kita akan berat. Tapi kalau masuk Mozambik, jangan-jangan kita menjadi negara yang nomor satu di situ," tutupnya.

ftn.pun/rdn



Hadiri Sidang IPU Bahrain, Ratih Beri Perspektif Perempuan dalam Isu Perdamaian



FOTO: VIN/PTD

Anggota BKSAP DPR RI Ratih Megasari Singkarru Ratih saat menghadiri pertemuan organisasi Parlemen Dunia, Sidang IPU ke-146 di Manama, Bahrain.

Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ratih Megasari Singkarru Ratih menghadiri pertemuan organisasi Parlemen Dunia, *146th Assembly of the IPU (Inter-Parliamentary Union) and Related Meetings* di Manama, Bahrain, Sabtu hingga Rabu (11-15/3). Ratih, yang terpilih menjadi representatif perempuan mewakili Asia Pacific Group untuk duduk di Komisi Perdamaian dan Keamanan Internasional (*Committee on Peace and International Security*), menekankan bahwa posisi tersebut memiliki signifikansi yang tinggi.

"Meningat sebagai perempuan, saya dapat turut serta memberikan perspektif yang lebih *gender balanced* terhadap isu perdamaian dan keamanan internasional yang dibahas di IPU," ujar Ratih dalam rilis

yang diterima **Parlementaria**, Rabu (15/3).

Ratih menyatakan bahwa perempuan terkena dampak yang tidak proporsional selama bencana atau konflik. Menurutnya, perempuan dibebani kerja dengan bayaran yang tidak sepadan atau bahkan tak dibayar yang sangat berdampak

”

DI INDONESIA SENDIRI, MEMILIKI STRATEGI NASIONAL PENGARUSUTAMAAN GENDER SEBAGAI BAGIAN DARI DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL JANGKA MENENGAH (RPJMN).

pada kesejahteraan mereka. Belum lagi, dampak perubahan iklim yang dialami perempuan sehari-hari.

"Di sinilah saya merasa peran penting anggota parlemen dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk perempuan, pemuda dan komunitas yang secara historis terpinggirkan di tengah situasi global yang penuh dengan tantangan ini," ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Selain itu, Ratih mengungkapkan, di Indonesia, sekitar 65 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir dan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan. Di antara 65 persen itu, tambahannya, 40 persen adalah perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan paling terpuak ketika iklim laut berubah. Oleh karena itu, tegas Ratih, penting bagi anggota parlemen untuk mengadvokasi mekanisme pembiayaan yang lebih *gender responsive*.

"Di Indonesia sendiri, memiliki strategi nasional pengarusutamaan gender sebagai bagian dari dokumen perencanaan nasional jangka menengah (RPJMN)," ujarnya.

Terkait hal itu, menurut Ratih, diperlukan pengawasan yang ketat pada penganggaran keuangan negara. Penganggaran keuangan negara melalui Kementerian/Lembaga yang diperuntukkan bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus dipastikan mengalir ke jalur yang tepat. Dana itu harus memberdayakan perempuan di garis depan pertahanan perubahan iklim. [pun/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua MKD: Wakil Rakyat Bukan Sekadar Jabatan

Ketua Mahkamah Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun mengungkapkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) bukan hanya tentang memilih calon wakil rakyat yang disajikan partai politik. Namun juga memilih calon wakil rakyat yang mampu memahami arti dan makna dari rakyat itu sendiri.

Pemilu 2024 mendatang menjadi ajang kontestasi untuk mencari wakil rakyat yang bernurani dan berparadigma etis. Tidak hanya memilih calon wakil rakyat yang disajikan partai politik, melainkan memilih calon wakil rakyat yang mampu memahami arti dan makna dari rakyat itu sendiri," ungkap Adang saat membuka Seminar MKD DPR RI bertajuk Menyongsong Kontestasi Demokrasi; Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan Berparadigma Etis" di Jakarta, Jumat (17/3).

Melihat sangat pentingnya hal itu, maka MKD DPR RI menggelar seminar tentang bagaimana mencari calon wakil rakyat yang memiliki visi-misi, nurani, dan etika sebagai salah satu program lembaganya yang bertugas menjaga kehormatan atau marwah anggota dewan.

"Wakil rakyat bukan sekadar jabatan belaka, namun dalam konteks paradigma etis terkandung pula nilai di dalamnya. Tapi juga dibaluti visi-misi dan nurani. Mereka yang terpilih diharapkan menjadi figur dengan sejujur tubuh yang merakyat serta perilaku etis yang menunjukkan bahwa mereka terhubung dan berbicara tentang rakyat dan nurani," paparnya.



Ketua Mahkamah Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun saat membuka Seminar MKD DPR RI bertajuk Menyongsong Kontestasi Demokrasi; Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan Berparadigma Etis" di Jakarta, Jumat (17/3/2023).

”

BIAR MASYARAKAT AWARE. JADI YANG MILIH INI KAN RAKYAT, BIAR DIBERI PENJELASAN TENTANG HASIL-HASIL SEMINAR INI DENGAN PEMBICARA-PEMBICARA YANG SANGAT PROFESIONAL, SENIOR. KITA BISA MUDAH-MUDAHAN MENDAPATKAN WAKIL-WAKIL RAKYAT YANG BAIK.

Oleh karenanya, pihaknya berharap sekali bahwa sebagai Anggota DPR RI, tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya pun harus jelas. Dengan kata lain, seminar ini ia bilang sebagai sebuah pemanasan. Pemanasan dalam arti mencari wakil-wakil yang baik dalam rangka membangun dan menjaga martabat Dewan Perwakilan Rakyat.

"Biar masyarakat *aware*. Jadi yang milih ini kan rakyat, biar diberi penjelasan tentang hasil-hasil seminar ini dengan pembicara-pembicara yang sangat profesional, senior. Kita bisa mudah-mudahan mendapatkan wakil-wakil rakyat yang baik," tegasnya. **ayu/aha**



Nurul Arifin Pimpin Pansus RUU Landas Kontinen

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Anggota Komisi I Nurul Arifin menjadi Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen menggantikan ketua sebelumnya Anggota DPR RI Maman Abdurrahman. Pergantian tersebut, kata Dasco berdasarkan surat dari Pimpinan Fraksi Golongan Karya perihal pergantian nama Pimpinan Pansus RUU tentang Landas Kontinen dari Fraksi Partai Golkar DPR RI

"Atas dasar surat tersebut maka terjadi perubahan susunan Ketua

Pansus RUU tentang Landas Kontinen dari unsur Fraksi Partai Golongan Karya yaitu semula saudara Muhammad Abdurrahman S.T diganti oleh saudari Nurul Arifin M.Si anggota nomor A287," ujarnya, Senin (20/3).

Sementara itu, Nurul Arifin mengatakan komitmennya untuk dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023 ini. "Tadinya komitmen bersama untuk menyelesaikan di masa sidang ini, karena selain waktunya sudah terlalu lama, juga memang sudah dibutuhkan keberadaannya undang-undang ini," tegasnya. **— bia/aha**



FOTO: RASB/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menetapkan Anggota Komisi I Nurul Arifin menjadi Ketua Panitia Khusus RUU Landas Kontinen di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Menakar Pelaksanaan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

anytime, anywhere, support the parliament.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen penting bagi berjalannya roda pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, pemilu secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1995 Pasal 22E ayat (1) s.d (6) dimana pada pasal (2) menjelaskan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Selain sebagai pemenuhan atas kebutuhan kekuasaan dan kepemimpinan negara, pemilu juga dianggap sebagai wadah bagi rakyat dalam memberikan aspirasinya dan kepentingan dalam kehidupan bersama. Berdasarkan UU no. 8/2012 pasal 1 angka 1. Pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Agar terlaksananya pemilu maka dibutuhkan sistem pemilu yang dapat digunakan untuk menentukan tata cara penyelenggaraan dan penentuan hasil pemenang pemilu. Secara umum terdapat tiga sistem pemilu yang diterapkan di dunia yaitu sistem pluralitas, proporsional, serta sistem campuran. Pada tahun 2024 nanti, pemilu akan diselenggarakan secara serentak sesuai dengan UU no. 7/2017 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional merupakan sistem yang menyediakan beberapa kursi parlemen yang akan diperebutkan pada wilayah pemilihan, artinya rasio perolehan suara di partai akan sama dengan rasio perolehan jumlah kursi parlemen.

Penggunaan sistem proporsional terbuka dalam pemilu serentak tahun 2024 dipandang memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai berikut:

Kelebihan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu Serentak tahun 2024:

- Sistem proporsional terbuka dinilai mewakili proporsi jumlah kursi karena jumlah kursi yang didapatkan partai di parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh.
- Dinilai lebih adil bagi pemilih karena dibebaskan untuk memilih wakil legislatifnya dan dapat memonitoring secara langsung kinerja wakilnya.
- Sistem proporsional terbuka dapat membuka peluang bagi partai kecil (minoritas) untuk tetap dapat dipilih atau memperoleh akses perwakilan dan dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan.

Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka untuk Pemilu Serentak tahun 2024:

- Potensi terjadinya tarik menarik kepentingan partai politik (fragmentasi partai) yang berakibat pada kurangnya dukungan partai untuk saling berintegrasi atau bekerjasama bahkan cenderung untuk mempertajam perbedaan.
- Proses perhitungan suara yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama disebabkan oleh pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 akan mempunyai jumlah kandidat atau calon yang cukup banyak untuk dipilih.
- Dari sisi anggaran, terdapat potensi terjadinya politik uang karena para kandidat akan melakukan berbagai cara agar bisa terpilih.

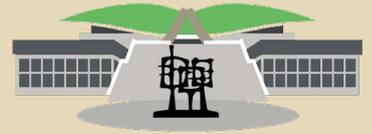
Kesimpulan

Setiap sistem pemilu memiliki dampak positif dan negatifnya. Namun, pemerintah tetap perlu memilih satu sistem yang dianggap terbaik dengan berbagai dampak yang didapatkan. Penggunaan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu Serentak tahun 2024 merupakan pilihan terbaik karena mengedepankan kebebasan untuk rakyat Indonesia dalam memilih calon legislatifnya.

Tujuan dipilihnya sistem pemilu proporsional terbuka adalah agar hasil dari pemilu serentak menghasilkan para wakil rakyat yang bertanggung jawab dan dekat dengan konstituennya. Namun, dalam kenyataannya potensi praktik politik uang masih tetap akan terjadi. Sehingga masih perlu adanya koordinasi oleh seluruh pihak terkait sehingga pelaksanaan pemilu serentak dapat berjalan sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul saat melakukan sosialisasi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten/Kota di Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). FOTO: AFR/PDT



Kegiatan Women's Day Run 10K yang dilaksanakan di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (12/3/2023). FOTO: GER/PDT



Pt Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartin saat foto bersama pada agenda Parlemen Kampus yang diselenggarakan oleh Biro Protokol dan Humas, Sekretariat Jenderal DPR RI, di Universitas Andalas, Rabu (15/03/2023). FOTO: ENO/PDT